

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (SOPD)
(RENSTRA 2016 – 2021)**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BANJARBARU
TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....
	1.1 Latar Belakang.....
	1.2 Landasan Hukum.....
	1.3 Maksud dan Tujuan.....
	1.4 Sistematika Penulisan.....
	1.5 Latar Belakang Perubahan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1 Tugas , fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Daerah.....
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Satpol PP Provinsi.....
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5 Penentuan Isu- isu Strategis.....
BAB IV	TUJUAN, SASARAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.....
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan pasal 255 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja mengemban peran strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan dan memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Banjarbaru. Peran tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan program kegiatan yang jelas dan terarah.

Untuk kepentingan tersebut, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, guna menjamin kontinuitas dan konsistensi serta aplikasi program/kegiatan yang menunjang program Pemerintah Kota Banjarbaru.

Lebih dari itu renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru dipastikan akan dijadikan sebagai pedoman perencanaan komprehensif tentang cara untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien, agar memiliki fokus sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan.

Secara umum Renstra Satpol PP memiliki tujuan dan pedoman yang terencana dalam mengoptimalkan potensi SDM anggota Satpol PP yang dimiliki dalam rangka mewujudkan/menciptakan Kota Banjarbaru yang tertib dan kondusif.

Sedangkan secara khusus dirumuskan untuk memberikan gambaran riil potret potensi berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada pada Satpol PP, sebagai syarat penetapan program dan sasaran kerja yang terarah dan terukur pada masa 5 (lima) tahun mendatang.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33) ;

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, tata cara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 517) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 590) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 705) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 874) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 1058) ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6) ;
20. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 45)
21. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Dan Kepala Seksi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 54)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Walikota Banjarbaru terpilih yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan Satpol PP selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Walikota.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Menerjemahkan visi misi Walikota Banjarbaru terpilih ke dalam tujuan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah tentang RPJMD periode 2016-2021 ;

2. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksana program dan kegiatan disertai sasaran dan fokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan ;
3. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategi (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN.....
	1.6 Latar Belakang.....
	1.7 Landasan Hukum.....
	1.8 Maksud dan Tujuan.....
	1.9 Sistematika Penulisan.....
	1.10Latar Belakang Perubahan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.5 Tugas , fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.6 Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.7 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.8 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.6 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.7 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Daerah.....
	3.8 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Satpol PP Provinsi.....
	3.9 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.10Penentuan Isu- isu Strategis.....
BAB IV	TUJUAN, SASARAN
	4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.....
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas pokok, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru adalah sebagaimana disebutkan didalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Tugas Pokok :

1. Pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah *“Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”*
2. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 *“Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas memelihara menegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”.*
3. Pasal 3 Peraturan Walikota Banjarbaru No. 45 Tahun 2013 *“Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru mempunyai Tugas Pokok Menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”.*

Fungsi :

1. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 *“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Satpol PP mempunyai fungsi :*
 - a. *Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda penelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan*
 - b. *Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peratuan Kepala Daerah;*
 - c. *Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah*
 - d. *Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat*
 - e. *Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peratura Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan atau aparaturnya;*

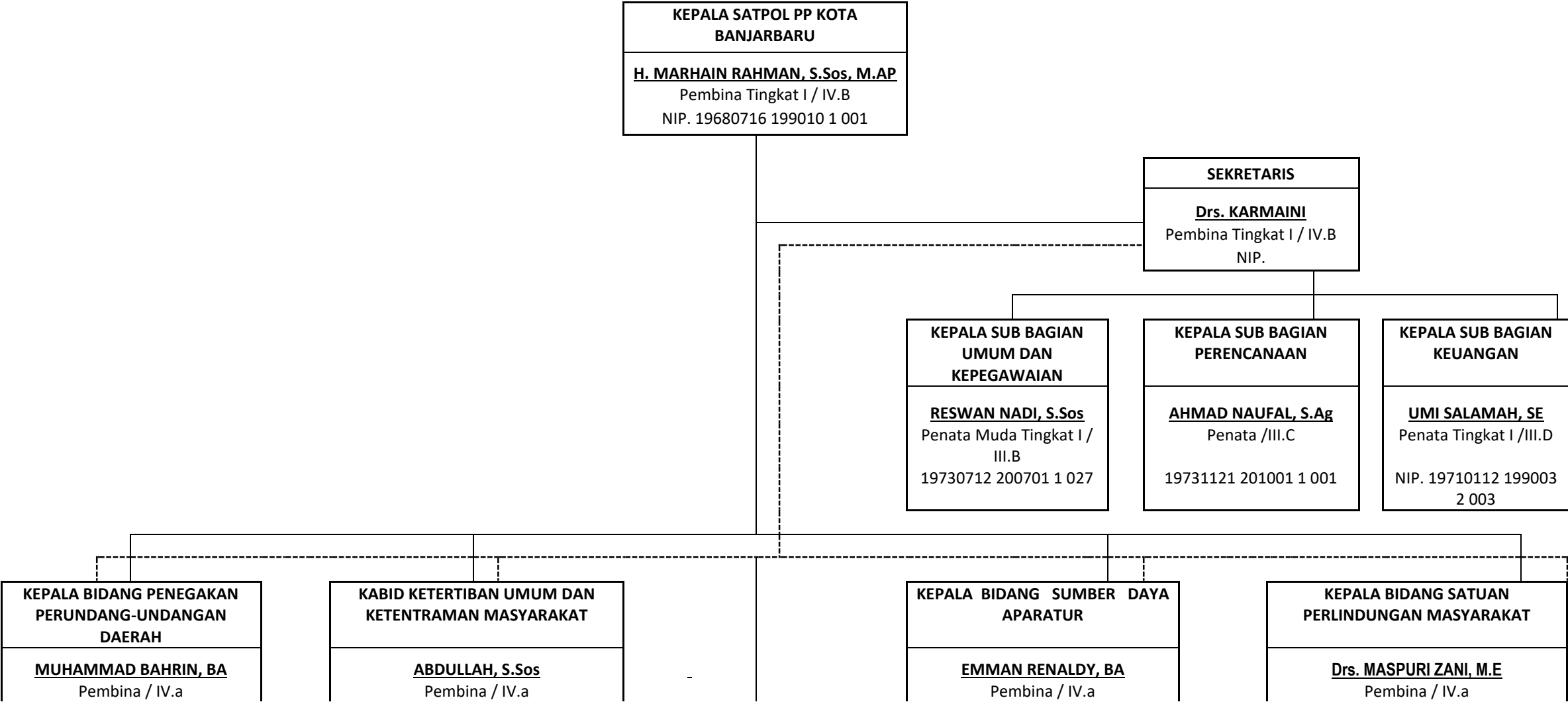
- f. Pengawasan terhadap masyarakat , aparatur atau badan hokum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah/ atau aparatur lainnya;*
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberi oleh Kepala Daerah”*
- 2. Pasal 4 Peraturan Walikota Banjarbaru No. 45 Tahun 2013 “Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Fungsi :
 - a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;*
 - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan Peraturan Walikota*
 - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat didaerah;*
 - d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;*
 - e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan atau aparatur lainnya;*
 - f. Pengawasan terhadap masyarakat , aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah/ atau aparatur lainnya;*
 - g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan*
 - h. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan*
 - i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota”*

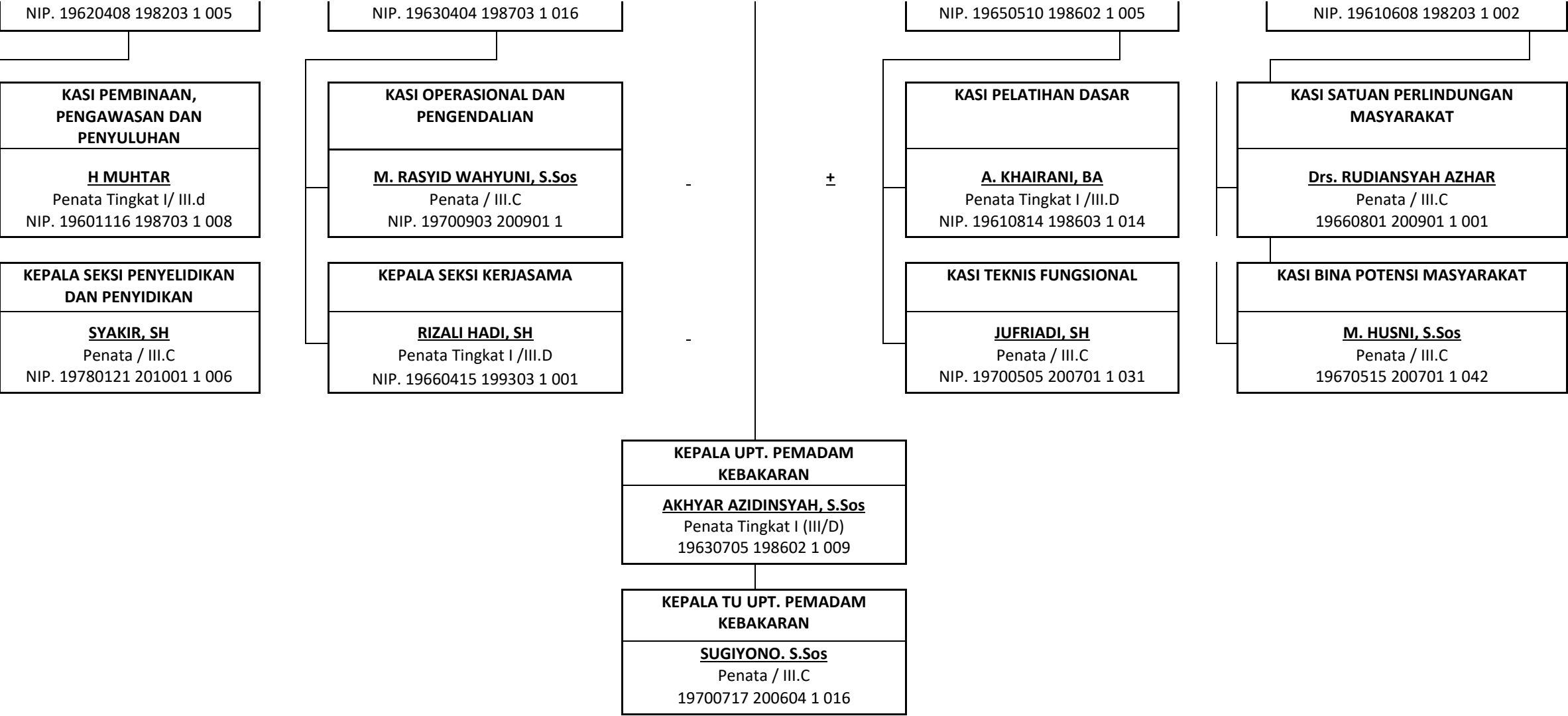
Struktur Organisasi :

Adapun Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Banjarbaru tergambar sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARBARU





2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.1 Sumber Daya Manusia

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru memiliki sumber daya Manusia Pegawai Negeri Sipil sebanyak 68 orang, dan Tenaga Kontrak sebanyak 67 Orang.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru berdasarkan Golongan Pangkat adalah sebagai berikut :

NO	BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN			
1	Pembina Tk. I	IV b	2	Orang
2	Pembina	IV a	4	Orang
3	Penata Tk. I	III d	4	Orang
4	Penata	III c	7	Orang
5	Penata Muda Tk. I	III b	11	Orang
6	Penata Muda	III a	4	Orang
7	Pengatur Tk. I	II d	7	Orang
8	Pengatur	II c	22	Orang
9	Pengatur Muda Tk. I	II b	5	Orang
10	Pengatur Muda	II a	2	Orang
	Jumlah		68	Orang

NO	BERDASARKAN JENIS KELAMIN			
1.	Laki-laki	:	63	Orang
2.	Perempuan	:	5	Orang
	Jumlah		68	Orang

Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru berdasarkan Pendidikannya sebagai berikut :

NO	BERDASARKAN PENDIDIKAN		
1	S-2	:	3 Orang
2	S-1	:	23 Orang
3	Diploma	:	4 Orang
4	SLTA	:	38 Orang
5	SLTP	:	0 Orang
			68 Orang

2.1.2 Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia yang terampil dan profesional, juga ketersediaan sarana dan prasarana sebagai unsur penting pendukung kinerja anggota Satpol PP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kota Banjarbaru.Untuk itu, berhasil tidaknya suatu program sekaligus menjadi penentu arah kebijakan program Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Sarana dan prasarana pendukung program kegiatan, merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah untuk digunakan oleh Satpol PP dengan kondisi baik dan layak pakai.

Adapun jenis sarana prasarana yang tersedia pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru saat sekarang ini dapat terlihat pada tabel berikut :

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi
1	Gedung Kantor	Buah	1	Baik
2	Truck Dalmas	Buah	1	Baik
3	Hilux	Buah	1	Baik
4	Kijang Pick up dan Panther	Buah	3	Baik
5	Mobil Katana	Buah	1	Baik
6	Kendaraan Roda 2	Buah	9	Baik
		Buah	5	Baik
7	Lemari Besi	Buah	16	Baik

Jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Banjarbaru
dirinci sebagaimana berikut :

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG				Ukuran			JUMLAH				
							Asal/Cara	Tahun	Barang/	Keadaan				
			Merk/	No. Sertifikat	Bahan	Satuan								Keterangan
						No. Pabrik	Perolehan	Pem-	Konstruksi	Barang				
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Type				Barang	belian	(B/KB/RB)	Barang	Harga		
						No. Chasis	(P, S, D)							
						No. Mesin								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02.02.01.10.03	0001	Truck Crane	ISUZU ELF /	-	BESI	Pembelian	2014	1500		Baik	1	354.900.000,00	
	2	02.03.01.02.03	0002	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	ISUZU ELF Toyota Kijang /	MHF 31 KF 6030022033	Besi	Pembelian	2003	1781		Baik	1	42.500.000,00
	3	02.03.01.02.03	0003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Suzuki Katana /	MHYESJ4106J-088915	Besi	Pembelian	2006	970		Baik	1	112.500.000,00
	4	02.03.01.02.03	0004	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Suzuki Katana Toyota Avanza /	DL71021	BESI	Pembelian	2012	1298		Baik	1	164.750.000,00
	5	02.03.01.02.03	0005	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota Avanza TOYOTA ALL	-		Pembelian	2015		Baik	1	420.305.000,00	PENGADAAN MOBIL DOUBLE CABIN
	6	02.03.01.03.02	0001	Pick Up	NEW HILUX DOUBLE CABIN G M/T VIN 2015	MHCTBR54BCK163764	BESI	Pembelian	2012	2499		Baik	1	174.860.802,00
	7	02.03.01.05.01	0006	Sepeda Motor	Isuzu/ TBR 54 Turbo / Isuzu/ TBR 54 Turbo	MH1KEV8132K57771	BESI	Pembelian	2002	100		Kurang Baik	1	4.800.000,00
	8	02.03.01.05.01	0007	Sepeda Motor	HONDA/NF100 / HONDA/NF100	MH1KEVA154K695840	BESI	Pembelian	2004	100		Kurang Baik	1	7.800.000,00
	9	02.03.01.05.01	0001	Sepeda Motor	HONDA/NF100 Suzuki / Suzuki	MH8EN1255A4J-122004	BESI	Pembelian	2005	125		Kurang Baik	1	7.400.000,00
	10	02.03.01.05.01	0002	Sepeda Motor	Suzuki / Suzuki	MH8EN125A4J-1218888	BESI	Pembelian	2005	125		Kurang Baik	1	7.400.000,00
	11	02.03.01.05.01	0003	Sepeda Motor	HONDA/NF11B2 D1 / HONDA/NF11B2	MH1JBE317CK182489	BESI	Pembelian	2012	110		Kurang Baik	1	13.154.975,00
	12	02.03.01.05.01	0013	Sepeda Motor	D1 MEGAPRO / MEGAPRO	-	BESI	Pembelian	2013	150CC		Baik	1	19.577.850,00

Renstra
Satuan polisi pamong praja
Kota banjarbaru tahun 2016 - 2021

13	02.03.01.05.01	0001 s/d 0002	Sepeda Motor	HONDA/100 / HONDA/100	-	BESI	Pembelian	2014	100	Baik	2	34.150.726,00	
14	02.03.01.05.01	0001 s/d 0002	Sepeda Motor	HONDA/125 / HONDA/125	-	BESI	Pembelian	2014	125	Baik	2	31.897.113,00	
15	02.03.01.05.01	0001 s/d 0002	Sepeda Motor	SUPRA X / 125 F1	-		Pembelian	2015	125	Baik	2	34.244.000,00	PENGADAAN KENDARAAN DINAS RODA 2
16	02.03.01.05.01	0001 s/d 0002	Sepeda Motor	SUZUKI INAZUMA 250CC	-		Pembelian	2015		Baik	2	170.480.000,00	PENGADAAN KENDARAAN DINAS MOTOR RODA 2 PATWAL
17	02.04.03.06.07	0001 s/d 0002	Waveform Monitor Set With Level And Vector Display	-	-		Pembelian	2014		Baik	2	4.000.000,00	
18	02.04.03.08.24	0001	Air Conditioning Unit	SHARP / STANDAR	-	PLASTIK	Pembelian	2015	1 PK	Baik	1	4.400.000,00	AC1 PK SHARP (1) TH, 2015
19	02.04.03.08.24	0002	Air Conditioning Unit	SHARP / STANDARD	-	PLASTIK	Pembelian	2015		Baik	1	4.400.000,00	ACSHARP 1 PK (2) TAHUN 2015
20	02.04.03.08.24	0003	Air Conditioning Unit	SHARP / STANDARD	-	PLASTIK	Pembelian	2015		Baik	1	4.400.000,00	AC 1PK SHARP (3) TH 2015
21	02.06.01.01.01	0001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	OLYIMPIA / OLYIMPIA	-	PLASTIK	Pembelian	2012	-	Baik	1	2.000.000,00	
22	02.06.01.01.01	0004	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	BROTHER / BROTHER	-	BESI	Pembelian	2013		Baik	1	2.000.000,00	
23	02.06.01.04.01	0001 s/d 0002	Lemari Besi	- / -	-	BESI	Pembelian	2006	-	Kurang Baik	2	1.200.000,00	
24	02.06.01.04.01	0001 s/d 0002	Lemari Besi	-	-	BESI	Pembelian	2014		Kurang Baik	2	5.500.000,00	
25	02.06.01.04.03	0001	Rak Kayu	PRO DESIIGN	-	KAYU	Pembelian	2014		Baik	1	875.000,00	
26	02.06.01.04.04	0001 s/d 0004	Filling Besi/Metal	BROTHER / BROTHER	-	BESI	Pembelian	2003	-	Kurang Baik	4	3.158.000,00	
27	02.06.01.04.04	0006	Filling Besi/Metal	-	-		Pembelian	2006		Baik	1	845.000,00	
28	02.06.01.04.04	0007	Filling Besi/Metal	BROTHER / 4 LACI	-	BESI/METAL	Pembelian	2015	133 X 45,5 X 62 CM	Baik	1	2.200.000,00	FILLING CABINET (1) TH.2015
29	02.06.01.04.04	0008	Filling Besi/Metal	BROTHER / 4 LACI	-	BESI/METAL	Pembelian	2015	133 X 45,5 X 62 CM	Baik	1	2.200.000,00	FILLING CABINET (2) TH.2015
30	02.06.01.04.04	0009	Filling Besi/Metal	BROTHER / 4 LACI	-	BESI/METAL	Pembelian	2015	133 X 45,5 X 62 CM	Baik	1	2.200.000,00	FILLING CABINET (3) TH. 2015
31	02.06.01.04.04	0010	Filling Besi/Metal	BROTHER / 4 LACI	-	BESI / METAL	Pembelian	2015	133 X 45.5 X 62 CM	Baik	1	2.200.000,00	FILLING CABINET (4) TH. 2015
32	02.06.01.05.01	0001	Papan Visuil	- / -	-	KAYU	Pembelian	2002	-	Kurang Baik	1	245.000,00	
33	02.06.01.05.01	0003	Papan Visuil	- / -	-	KAYU	Pembelian	2003	-	Kurang Baik	1	250.000,00	
34	02.06.01.05.07	0001 s/d 0005	Papan Pengumuman	- / -	-	KAYU	Pembelian	2003	-	Kurang Baik	5	1.340.000,00	

Renstra
Satuan polisi pamong praja
Kota banjarbaru tahun 2016 - 2021

35	02.06.02.01.01	0002	Lemari Kayu	OLYMPIC /	-	KAYU	Pembelian	2005	-	Kurang Baik	1	422.000,00	
36	02.06.02.01.01	0001 s/d 0002	Lemari Kayu	-	-	KAYU	Pembelian	2014		Kurang Baik	2	3.500.000,00	
37	02.06.02.01.30	0001	Kursi Putar	- / -	-	BESI	Pembelian	1999	-	Kurang Baik	1	250.000,00	
38	02.06.02.01.30	0002	Kursi Putar	- / -	-	KAYU	Pembelian	1999	90x50	Kurang Baik	1	175.000,00	
39	02.06.02.01.30	0001 s/d 0004	Kursi Putar	CHITOS /	-	BESI	Pembelian	2012	-	Baik	4	2.000.000,00	
40	02.06.02.01.30	0008	Kursi Putar	-	-	BESI	Pembelian	2014		Baik	1	500.000,00	
41	02.06.02.01.31	0003	Kursi Biasa	- / -	-	KAYU	Pembelian	2003	-	Kurang Baik	1	224.000,00	
42	02.06.02.01.34	0001 s/d 0004	Kursi Lipat	CHITOS /	-	BESI	Pembelian	2012	-	Baik	4	1.000.000,00	
43	02.06.02.01.37	0002	Meja Komputer	CHITOS	-	KAYU	Pembelian	2006	-	Kurang Baik	1	337.000,00	
44	02.06.02.01.37	0001 s/d 0003	Meja Komputer	OLYMPIC /	-	KAYU	Pembelian	2014		Baik	3	1.500.000,00	
45	02.06.02.01.49	0001	Sofa	-	-	KAYU	Pembelian	2011	-	Baik	1	2.500.000,00	
46	02.06.02.01.49	0002	Sofa	- / -	-	KAYU	Pembelian	2014		Baik	1	8.500.000,00	
47	02.06.02.01.66	0001 s/d 0005	Kursi Kerja	-	-		Pembelian	2014		Baik	5	1.750.000,00	
48	02.06.02.01.73	0001 s/d 0008	Karpet	-	-		Pembelian	2014		Baik	8	2.000.000,00	
49	02.06.02.01.73	0003	Karpet	-	-		Pembelian	2014	Meter	Baik	1	250.000,00	
50	02.06.02.01.73	0004	Karpet	-	-		Pembelian	2014		Baik	1	250.000,00	karpet
51	02.06.02.02.03	0001 s/d 0004	Jam Elektronik	MASPION /	-	PLASTIK	Pembelian	2003	-	Kurang Baik	4	288.000,00	
52	02.06.02.03.01	0001	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	MASPION	-		Pembelian	2014		Baik	1	1.500.000,00	
53	02.06.02.04.01	0002	Lemari Es	-	-		Pembelian	2014		Baik	1	2.500.000,00	
54	02.06.02.04.02	0001	AC Sentral	LG	-	PLASTIK/VIBER	Pembelian	2014	2PK	Baik	1	7.500.000,00	
55	02.06.02.04.03	0001	AC Unit	SHARP / SHARP	-	BESI	Pembelian	2011	-	Kurang Baik	1	4.000.000,00	
56	02.06.02.04.03	0002	AC Unit	SHARP / SHARP	-	BESI	Pembelian	2011	1PK	Kurang Baik	1	4.538.000,00	
57	02.06.02.04.03	0003	AC Unit	-	-		Pembelian	2014		Baik	1	4.500.000,00	
58	02.06.02.04.06	0001 s/d 0003	Kipas Angin	-	-		Pembelian	2014		Baik	3	1.500.000,00	
59	02.06.02.06.03	0002	Televisi	-	-		Pembelian	2014		Baik	1	4.500.000,00	
60	02.06.02.06.03	0003	Televisi	SHARP LCD	-		Pembelian	2014		Baik	1	4.500.000,00	
61	02.06.02.06.13	0001	Megaphone	N29/ZR-2015S /	-	PLASTIK	Pembelian	2012	50CM	Kurang Baik	1	500.000,00	
62	02.06.02.06.22	0002	Camera Film	N29/ZR-2015S	-		Pembelian	2008		Rusak Berat	1	3.000.000,00	
63	02.06.02.06.22	0001	Camera Film	-	-	PLASTIK	Pembelian	2011	-	Kurang Baik	1	1.500.000,00	
				CANON / CANON	-								

Renstra
Satuan polisi pamong praja
Kota banjarbaru tahun 2016 - 2021

64	02.06.02.06.23	0002	Tustel	NIKON / NIKON	-	BESI	Pembelian	2005	-	Kurang Baik	1	750.000,00	
65	02.06.02.06.38	0001	Kaca Hias	- / -	-	KACA	Pembelian	2003	-	Kurang Baik	1	15.000,00	
66	02.06.02.06.39	0001	Dispenser	- / -	-	BESI	Pembelian	2005	-	Kurang Baik	1	122.000,00	
67	02.06.02.06.49	0001	Handy Cam	CANON	-	PLASTIK	Pembelian	2015		Baik	1	6.930.000,00	HANDY CAM UNTUK OPS PPNS
68	02.06.02.07.17	0001	Alat Pemdarn Kebakaran Lain-lain	-	-		Pembelian	2013		Baik	1	1.000.000,00	Tabung Pemadam Kebakaran
69	02.06.03.02.01	0001 s/d 0002	P.C Unit/ Komputer PC	HP / HP	-	PLASTIK	Pembelian	2009	-	Kurang Baik	2	17.561.250,00	
70	02.06.03.02.01	0005	P.C Unit/ Komputer PC	COMPAC / COMPAC	-	PLASTIK	Pembelian	2010	-	Kurang Baik	1	6.802.400,00	
71	02.06.03.02.01	0001 s/d 0002	P.C Unit/ Komputer PC	-	-		Pembelian	2013		Baik	2	25.500.000,00	
72	02.06.03.02.01	0001 s/d 0005	P.C Unit/ Komputer PC	-	-		Pembelian	2014		Baik	5	42.500.000,00	
73	02.06.03.02.03	0001 s/d 0004	Note Book	ACCER / ACCER	-	PLASTIK	Pembelian	2011	-	Baik	4	14.000.000,00	
74	02.06.03.02.03	0006	Note Book	ASUS / ASUS X450 JN	-	PLASTIK	Pembelian	2015	14"WXGA	Baik	1	12.400.000,00	LAPTOP ASUS PENGADAAN TH. 2015
75	02.06.03.02.03	0007	Note Book	ASUS / ASUS X450 JN	-	PLASTIK	Pembelian	2015	14 " WXGA	Baik	1	12.400.000,00	NOTE BOOK (2) TH.2015
76	02.06.03.04.08	0001 s/d 0002	Printer	-	-		Pembelian	2013		Baik	2	1.500.000,00	
77	02.06.03.04.08	0001 s/d 0004	Printer	-	-		Pembelian	2014		Baik	4	5.500.000,00	
78	02.06.03.04.08	0009	Printer	CANON / MP 287 INJEK MULTI FUNGSI	-	PLASTIK	Pembelian	2015	450X 153X335 MM	Baik	1	1.700.000,00	PRINTER TAHUN 2015
79	02.06.03.04.08	0010	Printer	CANON / MP 287 INJEK MULTI FUNGSI	-	PLASTIK	Pembelian	2015	450X153X335 MM	Baik	1	1.700.000,00	PRINTER (2) THN 2015
80	02.06.03.04.08	0011	Printer	CANON / MP 287 INJEK MULTI FUNGSI	-	PLASTIK	Pembelian	2015	450X153X335 MM	Baik	1	1.700.000,00	PRINTER (3) TAHUN 2015
81	02.06.03.05.03	0001 s/d 0004	Printer	CANON / CANON	-	PLASTIK	Pembelian	2011	-	Kurang Baik	4	3.600.000,00	
82	02.06.03.05.03	0001 s/d 0002	Printer	-	-		Pembelian	2014		Baik	2	2.000.000,00	
83	02.06.03.05.18	0001 s/d 0002	Speaker Aktive Komputer	-	-		Pembelian	2014		Baik	2	1.000.000,00	
84	02.06.04.01.04	0001	Meja Kerja Pejabat Eselon II	-	-	KAYU	Pembelian	2014		Baik	1	3.125.000,00	
85	02.06.04.01.05	0001	Meja Kerja Pejabat Eselon III	- / -	-	KAYU	Pembelian	1999	-	Kurang Baik	1	150.000,00	
86	02.06.04.01.05	0001 s/d 0004	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	-	KAYU	Pembelian	2014		Baik	4	9.056.400,00	
87	02.06.04.01.05	0007	Meja Kerja Pejabat Eselon III	DESIGN	-	KAYU	Pembelian	2014		Baik	1	2.200.000,00	
88	02.06.04.01.06	0001 s/d 0004	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	SANTANO /	-	KAYU	Pembelian	2011	100x150	Kurang Baik	4	6.200.000,00	
89	02.06.04.01.06	0001 s/d 0002	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	SANTANO OGGI	-	BESI	Pembelian	2014		Baik	2	1.800.100,00	

Renstra
Satuan polisi pamong praja
Kota banjarbaru tahun 2016 - 2021

90	02.06.04.01.06	0001 s/d 0008	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	-	KAYU	Pembelian	2014		Baik	8	8.000.000,00	
91	02.06.04.01.10	0001 s/d 0005	Meja Kerja	-	-		Pembelian	2014		Baik	5	3.750.000,00	BELANJA MODAL
92	02.06.04.01.10	0001 s/d 0033	Meja Kerja	OGGI / 1/2 BIRO	-		Pembelian	2015	120 X 60 X 74 CM	Baik	33	31.350.000,00	PENGADAAN MEJA KERJA STAF PENGADAAN MEJA KERJA STAFF
93	02.06.04.03.04	0001	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	-	-	KAYU	Pembelian	2014		Baik	1	3.188.900,00	
94	02.06.04.03.05	0001 s/d 0004	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	-	KAYU	Pembelian	2014		Baik	4	5.740.000,00	
95	02.06.04.03.05	0006	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	-	BESI	Pembelian	2014		Baik	1	1.435.000,00	
96	02.06.04.03.06	0001 s/d 0002	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	-	BESI	Pembelian	2014		Baik	2	1.403.200,00	
97	02.06.04.03.06	0001 s/d 0008	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	-	KAYU	Pembelian	2014		Baik	8	5.612.800,00	
98	02.06.04.03.08	0001 s/d 0033	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	CHITOSE / CAESAR N	-		Pembelian	2015	410 X 505 X 872 MM	Baik	33	16.170.000,00	PENGADAAN KURSI KERJA STAFF
99	02.06.04.07.06	0001 s/d 0002	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	ESPANA / ESPANA	-	KAYU	Pembelian	2012	-	Kurang Baik	2	5.500.000,00	
100	02.06.04.07.06	0005	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	-	-		Pembelian	2013		Baik	1	1.750.000,00	
101	02.06.04.07.06	0004	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	-	-	KAYU	Pembelian	2014		Baik	1	4.000.000,00	
102	02.06.04.07.06	0006	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	EBONY / U/2 2D HIGH CBNT SM 53652	-	BESI	Pembelian	2015	2 PINTU	Baik	1	4.000.000,00	LEMARI 2 PINTU BESI (1) EBONY
103	02.06.04.07.06	0007	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	KRISBOW / MINIMALIS	-	BESI/METAL	Pembelian	2015		Baik	1	4.000.000,00	LEMARI ARSIP KRISBOW (2) TH.2015
104	02.06.04.07.06	0008	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	KRISBOW / KRISBOW	-	BESI METAL	Pembelian	2015		Baik	1	4.000.000,00	LEMARI ARSIP (3) TH, 2015
105	02.07.01.02.69	0001 s/d 0002	Printer	MULTIFUNGSI CANON / MULTIFUNGSI CANON	-	PLASTIK	Pembelian	2012	-	Kurang Baik	2	2.150.000,00	
106	02.07.02.01.08	0001	Sound System	CRIMSON SH-688	-	PLASTIK	Pembelian	2014		Baik	1	3.000.000,00	
107	02.07.02.01.14	0001	Handy Talky	WEIRWE / WEIRWE	-	BESI	Pembelian	2011	-	Kurang Baik	1	5.000.000,00	
108	02.07.02.01.14	0001 s/d 0013	Handy Talky	WEIRWEI / WEIRWEI	-	BESI	Pembelian	2011	-	Kurang Baik	13	16.450.000,00	
109	02.07.02.01.14	0020	Handy Talky	-	-		Pembelian	2013		Baik	1	20.000.000,00	
110	02.07.02.01.14	0001 s/d 0002	Handy Talky	MOTOROLA	-		Pembelian	2014		Baik	2	10.000.000,00	
111	02.07.02.01.25	0001	Base Station	-	-		Pembelian	2013		Baik	1	40.000.000,00	
112	02.07.02.06.02	0001	Wireless Amplifier	WIRELESS SH-668 / PORTABLE/MOVE	-	PLASTIK	Pembelian	2015	281X150X356 MM	Baik	1	2.250.000,00	WIRELESS SATPOL 2015

Renstra
Satuan polisi pamong praja
Kota banjarbaru tahun 2016 - 2021

ABLE AMPLIER													
113	02.09.01.16.82	0001	TV Monitor	SHARP / SHARP	-	PLASTIK	Pembelian	2011	32INCHI	Kurang Baik	1	4.250.000,00	Laptop Hybrid merk Acer KOMPUTER ALL IN ONE (1) TH.2015 KOMPUTER ALL IN ONE (2) TH 2015
114	02.09.01.47.62	0001	Personal Komputer	Accer / --	-	plastik	Pembelian	2015	-	Baik	1	7.300.000,00	
115	02.09.01.47.62	0002	Personal Komputer	LENOVO H-30-50	-	PLASTIK	Pembelian	2015	19,5"INC	Baik	1	8.400.000,00	
116	02.09.01.47.62	0003	Personal Komputer	/ H-30-50 LENOVO / H-30-50	-	PLASTIK	Pembelian	2015	19,5"	Baik	1	8.400.000,00	
117	02.10.01.01.02	0001 s/d 0002	Pistol	GECO / PISTOL	-		Pembelian	2014	9	Baik	2	99.020.000,00	SENJATA GENGAM
118	02.10.01.01.02	0004	Pistol	GAS - / -	-		Pembelian	2015	-	Baik	1	87.500.000,00	
119	02.10.02.01.10	0001 s/d 0027	Alat Khusus Keamanan Lainnya	- / -	-	FIBER	Pembelian	2010	50x100	Baik	27	26.703.000,00	
120	02.10.02.01.10	0001 s/d 0027	Alat Khusus Keamanan Lainnya	- / -	-	KARET	Pembelian	2010	-	Baik	27	972.000,00	
121	02.10.02.01.10	0001 s/d 0053	Alat Khusus Keamanan Lainnya	- / -	-	FIBER	Pembelian	2010	-	Baik	53	18.818.000,00	
122	02.10.02.02.11	0001	Tongkeng Kejut	-	-		Pembelian	2013		Baik	1	9.000.000,00	
Total												2.359.942.516,00	

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian ini menunjukkan tingkat caapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru berdasarkan sasaran / Target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja . Capaian kinerja melalui pelaksanaan renstra periode tahun 2010-2015.

Adapun tabel-tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian tabel dengan format sebagai berikut :

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Paja
Kota Banjarbaru

NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	789,716,000	716,194,300	985,073,541	1,179,591,500	1,392,725,000	709,206,000	831,997,900	931,704,575	990,925,200	1,225,587,276	1	1	1	1			
	Penyediaan jasa surat menyurat	1,500,000	1,650,000	1,950,000	3,183,000	3,000,000	1,500,000	1,630,500	1,950,000	3,183,000	2,490,000	1	1	1	1			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3,000,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,480,000	3,000,000	550,000	3,207,000	3,182,000	3,349,976	1	0	1	1			
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	55,250,000	60,699,650	60,702,500	69,000,000	72,450,000	54,938,000	58,044,150	56,346,700	10,900,000	72,450,000							
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3,600,000	3,900,000	4,200,000	6,000,000	6,800,000	3,600,000	3,900,000	4,200,000	6,000,000	6,000,000							
	Penyediaan alat tulis kantor	495,000	16,923,650	14,305,400	14,305,000	15,000,000	495,000	15,937,350	14,214,375	14,304,500	14,304,500							
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6,025,000	14,685,000	11,680,000	11,680,000	22,620,000	5,975,000	10,604,900	11,680,000	11,280,000	15,400,000							
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	63,416,000	4,750,000	2,923,500	2,923,500	5,000,000	57,838,000	4,750,000	2,923,500	2,923,500	4,366,500							
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	2,040,000	2,196,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,040,000	2,196,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000							
	Penyediaan makanan dan minuman	26,520,000	37,485,000	56,575,000	70,185,000	60,345,000	26,520,000	37,150,000	56,550,000	67,825,000	59,377,500							
	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60,320,000	66,205,000	135,337,141	150,815,000	178,840,000	45,825,000	58,485,000	133,758,000	144,152,200	137,428,800							

Renstra
Satuan polisi pamong praja
Kota banjarbaru tahun 2016 - 2021

	Penyediaan Jasa Non PNS	567,550,000	504,400,000	691,100,000	845,200,000	1,022,190,000	507,475,000	638,750,000	643,875,000	724,175,000	907,420,000						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	244,217,450	328,511,950	333,563,300	258,672,000	340,778,377	207,247,350	314,618,950	266,850,350	238,800,250	261,983,798						
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	18,600,000	22,659,000	19,500,000	33,274,000	35,760,000	18,600,000	22,554,000	19,500,000	28,724,000	28,623,000						
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	33,492,500	47,811,000	66,244,000	109,273,000	175,179,000	33,490,400	45,673,000	61,493,850	95,894,250	122,428,155						
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2,000,000	2,000,000	3,100,000	5,750,000	5,750,000	1,775,000	2,000,000	3,100,000	4,400,000	4,200,000						
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4,300,000	4,300,000	5,800,000	7,500,000	14,860,000	3,400,000	4,300,000	5,800,000	7,500,000	6,950,643						
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1,250,000	1,300,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	950,000	1,300,000	1,500,000	1,050,000	582,000						
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0	0	84,413,800	55,000,000	67,000,000	0	0	28,526,000	55,000,000	65,200,000						
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0	0	5,750,000	46,375,000	40,729,377	0	0	5,750,000	46,232,000	34,000,000						
	Pemeliharaan gedung kantor	107,909,950	105,766,950	0	0	0	105,766,950	105,766,950	0	0	0						
	Pengadaan Peralatan Pengendalian Massa (DALMAS)	76,665,000	144,675,000	147,255,500	0	0	43,265,000	133,025,000	141,180,500	0	0						
3	Program Pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	453,003,300	573,492,000	883,467,150	885,517,850	1,140,068,850	442,007,100	468,176,500	838,900,200	876,532,550	1,123,245,350						
	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah	19,449,100	93,492,000	67,845,500	67,845,450	77,924,000	19,449,100	66,712,000	56,037,500	64,517,250	73,895,300						
	Pengamanan dan Pengawasan Pejabat Negara / Daerah	381,586,200	380,000,000	553,439,400	445,443,300	594,118,000	370,590,000	324,929,000	553,380,950	445,443,300	594,118,000						

Renstra
Satuan polisi pamong praja
Kota banjarbaru tahun 2016 - 2021

	Patroli Lingkungan	51,968,000	100,000,000	159,699,000	159,699,000	183,877,000	51,968,000	76,535,500	137,324,500	159,654,000	183,877,000						
	Monitoring/Pengawasan Kegiatan Piket dan Pengamanan Pejabat Di Luar Kantor	0	0	102,483,250	102,483,250	115,433,000	0	0	92,157,250	101,487,450	104,733,200						
	Pendidikan dan Pelatihan Pendahuluan Bela Negara	0	0	0	18,046,950	18,046,950	0	0	0	15,648,750	17,121,950						
	Pemeliharaan, Ketentraman & Ketertiban Masyarakat Serta Pencegahan tindak Kriminal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Pengamanan dan Pengawalan Pejabat/Orang - Orang Penting	0	0	0	91,999,900	150,669,900	0	0	0	89,781,800	149,499,900						
4	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	57,620,000	97,020,000	319,301,300	428,301,100	418,453,210	57,620,000	95,040,000	210,336,300	420,201,799	361,860,810						
	Penegakan Perda, Keputusan Walikota dan Penertiban Perijinan	57,620,000	97,020,000	249,732,800	349,732,700	306,303,650	57,620,000	95,040,000	153,232,800	344,829,699	257,614,250						
	Sosialisasi dan Intelegensi Penegakan Perda	0	0	69,568,500	78,568,400	112,149,560	0	0	57,103,500	75,372,100	104,246,560						
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	44,607,000	40,000,000	50,000,000	59,999,900	89,997,500	41,627,000	32,864,000	45,443,500	50,762,700	74,847,000						
	Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	29,704,000	25,000,000	25,000,000	39,999,900	60,000,000	27,934,000	18,448,000	21,228,500	31,516,900	49,863,500						
	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	14,903,000	15,000,000	25,000,000	20,000,000	29,997,500	13,693,000	14,416,000	24,215,000	19,245,800	24,983,500						
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	140,405,000	28,000,000	39,673,800	1,064,970,000	355,691,550	109,780,000	16,800,000	23,508,800	224,460,200	200,114,350						
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	57,400,000	28,000,000	39,673,800	0	0	30,400,000	16,800,000	23,508,800	0	0						
	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	43,735,000	0	0	0	0	42,435,000	0	0	0	0						
	Pembinaan Rutin Secara Periodik Personil Satpol PP	12,733,000	0	0	0	0	10,408,000	0	0	0	0						

Renstra
Satuan polisi pamong praja
Kota banjarbaru tahun 2016 - 2021

	Peningkatan Disiplin dan Koordinasi Serta Manajemen konflik	10,325,000	0	0	0	0	10,325,000	0	0	0	0						
	Pembinaan Teknik Komunikasi Kegiatan di Lapangan	16,212,000	0	0	0	0	16,212,000	0	0	0	0						
	Pendidikan Dasar Satpol PP	0	0	0	900,000,000	235,692,000	0	0	0	85,500,000	141,696,600						
	Pendidikan Fungsional Satpol PP	0	0	0	164,970,000	119,999,550	0	0	0	138,960,200	58,417,750						
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	0	141,920,000	174,527,000	0	0	0	141,500,000	171,611,000						
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	0	0	141,920,000	174,527,000	0	0	0	141,500,000	171,611,000						
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	0	0	0	770,952,400	497,647,000	0	0	0	424,812,600	315,909,400						
	Peningkatan Kemampuan Satuan Perlindungan Masyarakat	0	0	0	770,952,400	497,647,000	0	0	0	424,812,600	315,909,400						
9	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	0	0	0	139,704,600	123,872,100	0	0	0	6,592,900	22,388,500						
	Peningkatan Kesiagaan Penanggulangan Bencana	0	0	0	139,704,600	123,872,100	0	0	0	6,592,900	22,388,500						

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Banjarbaru

H.MARHAIN RAHMAN, S.Sos, M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19680716 199010 1

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Paja
Kota Banjarbaru Periode Renstra 2010-2015

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	- Rasio jumlah polisi pamong praja				7.39	7.44	7.51	7.58	7.65	5.91									
	Jumlah Personil Non PNS				63	93	100	110	120	53	75	63	66	67					
	cakupan Patroli Petugas satpol PP				84 kali	96 kali	108 kali	115 kali	122 kali	84 kali									
	Jumlah Patroli Gabungan & Pengawasan Lingkungan				84	96	108	115	122	84	126	110	114	120					
	- Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketemtraman, keindahan)				70.2%	72.8%	76.0%	79.2%	81.5%	100%	43%								
	Jumlah Rumdin & Balai Kota yang diamankan 24 jam				5	5	5	5	5	5	5								
	Peningkatan Response Pengaduan Masyarakat 1 x 24 jam				≤ 15 Menit	≤ 15 Menit	≤ 15 Menit	≤ 15 Menit	≤ 15 Menit	≤ 15 Menit	≤ 15 Menit	≤ 15 Menit	≤ 15 Menit	≤ 15 Menit					
	- Penegakan Perda				20.8%	23.9%	27.5%	35.8%	43.1%	42,1%	49%	106.6 %	172 %	280%					
	Jumlah Pengawasan, Peneguran				195	210	225	225	250	126	120	240	387	433					

	dan Penindakan																	
	- Jumlah demo				4	3	2	2	1	4	2	0	0	0				
	Presentase Standar Kelengkapan Personil Dalmas				40%	50%	60%	65%	70%	40%	50%	50%	50%	50%				
	- Persentase pelaksanaan kegiatan rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Jumlah Personil yang mengikuti Pelatihan Manajemen Aset				1	1	1	1	2	1	1	2	2	2				
	Presentase pemenuhan barang/jasa untuk administrasi kantor				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Jumlah Materai & Perangko yang terpakai (lembar)				300	300	300	300	300	300	300	300	300	300				
	Jumlah line telp yang terpasang				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Jumlah Personil yang di cover asuransi				117	120	150	160	160	117	127	125	137	0				
	Jumlah petugas kebersihan kantor				1	2	2	2	2	1	1	1	1	1				
	Jumlah Barang ATK				14	14	14	14	14	14	14	14	14	51				
	Jumlah Jenis Barang yang di cetak				9	9	9	9	9	9	9	9	9	10				
	Jumlah jenis peralatan & perlengkapan yang di beli				25	25	25	25	25	25	16	25	25	29				
	Jumlah jenis bahan bacaan (koran) yang disediakan				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
	Jumlah Makan minum kantor				7560	7560	7560	7560	7560	7560	1512	7560	7560	11				

	(kali)										0							
	Jumlah Rakor dan Konsultasi Keluar Daerah				36	36	36	36	36	27	18	36	36	266				
	Jumlah unit dinas transport personil				8	9	9	9	9	8	1							
	Jumlah Unit Mobil pejabat yang dipelihara				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Jumlah Mobil Patroli yang dipelihara				1	2	2	3	3	1	1	3	3	11				
	Jumlah perlengkapan kantor yang diservice (buah)				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
	Jumlah peralatan kantor yang diservice (buah)				40	40	40	40	40	40	12	40	40	23				
	Jumlah Bangunan yang direhap				1	0	0	0	0	1	0	0	0	0				
	Jumlah mebeleur yang diperbaiki				10	10	20	20	20	10	2	20	20	3				
	Presentase Pelaporan Keuangan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Jumlah pencetakan pelaporan keuangan				175	175	175	175	175	175	75	175	6	6				
	- Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Jumlah Personil yang mengikuti Pelatihan Formal				7	7	8	10	10	7	3	0	0	0				
	Jumlah Jenis Pelatihan Nonformal				4	4	4	4	4	4	4	0	0	0				
	Jumlah Kegiatan Rutin Pembinaan Personil				22	30	40	40	40	22	0	0	0	0				

Renstra

Satuan polisi pamong praja
Kota banjarbaru tahun 2016 - 2021

	JumlahKegiatan Pembinaan DisiplinPersonil (kali)				16	0	0	0	0	16	0	0	0	0				
	Jumlah Kegiatan Pembinaan Komunikasi Personil (kali)				15	0	0	0	0	15	0	0	0	0				

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Banjarbaru

H.MARHAIN RAHMAN, S.Sos, M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19680716 199010 1 001

Renstra

Satuan polisi pamong praja

Kota banjarbaru tahun 2016 - 2021

2.4 Tantangan dan peluang Satpol PP Kota Banjarbaru terhadap ketertiban.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan arus globalisasi merupakan bentuk gangguan, ancaman dan tantangan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam kerangka postur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ada beberapa permasalahan yang menjadi faktor yang mempengaruhi diantaranya sosial, budaya, hukum, politik dan ekonomi. Agar masalah-masalah tersebut tidak berpeluang menjadi pemicu konflik dan mengganggu ketertiban, maka perlu identifikasi intensif, sehingga tantangan tersebut bisa diminimalisir untuk menciptakan situasi yang kondusif di Kota Banjarbaru.

1. Tantangan

Tantangan (*Threats*) yaitu situasi dan faktor-faktor luar yang bersifat negative dan dapat mengakibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru tidak dapat atau gagal dalam mencapai visi dan misi, yaitu meliputi :

- a. Belum tercukupinya jumlah personel pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru
- b. Terbatasnya kesempatan untuk mengikuti program Diklat Teknis.
- c. Masih kurangnya partisipasi dan kesadaran sebagian masyarakat terhadap ketertiban
- d. Masih kurangnya cakupan personel di Kecamatan jika dibandingkan dengan luas wilayah
- e. Arus urbanisasi yang tinggi sehingga tidak bisa dihindarkan menimbulkan masalah social seperti gelandangan dan pengemis.
- f. Masih kurangnya sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru
- g. Masih minimnya sosialisasi tentang Perda/Perwali
- h. Belum adanya lahan relokasi terhadap PKL yang berlokasi berpotensi melanggar PERDA

- i. Minimnya tenaga yang benar-benar memahami dan terampil ketika operasional lapangan
- j. Belum memiliki peta detail tata ruang Pelanggaran PERDA

2. Peluang

Peluang (*Opportunities*) yaitu situasi dan faktor-faktor luar bersifat positif yang membantu Satua Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi yang meliputi :

- a. Dukungan Kepala Daerah dan Ledislatif dalam menangani permasalahan Pelanggaran dan Penegakkan PERDA/PERKADA
- b. Tersedianya tenaga tambahan personel dari pegawai kontrak
- c. Adanya Peraturan dan Perundangan tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- d. Tersedianya anggaran yang memadai dalam usaha penegakan PERDA/PERKADA, Pengawalan Pejabat Negara dan Patroli Lingkungan dalam rangka memelihara Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan Masyarakat.
- e. Semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar masyarakat terhadap ketertiban.

Berikut ini kami gambarkan Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Satpol PP terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Satpol PP Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Banjarbaru Sebagai Kota Pelayanan Yang Berkarakter
Misi : Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib

Tujuan & Sasaran	Permasalahan Pelayanan Satpol PP	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Tujuan : Meningkatkan keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat Sasaran : Meningkatnya Keamanan, kesadaran hokum dan kesadaran kesadaran mastarakat	1. Masih kurangnya sarana dan prasarana 2. Masih kurangnya Jumlah personel 3. Kurangnya personel yang memahami perda & perkara 4. Terdapatnya garis komando yang belum jelas	Masih rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat (baik kelompok maupun individu) terhadap keteriban Arus urbanisasi yang tinggi disertai dengan peningkatan potensi gangguan tibum Belum adanya lahan relokasi terhadap PKL Adanya tumpang tindih kewenangan antar SKPD	• Dukungan Kepala Daerah dan Legeslatif dalam penegakan PERDA • Tersedianya tenaga tambahan personil dari pegawai kontrak • Tersedianya anggaran untuk melaksanakan Kegiatan Penegakan PERDA, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan Pengamanan Pejabat dan Asset Daerah • Satpol PP Kota Banjarbaru Tipe A

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas Menegakan Perda/Perkada, memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi, diantaranya :

- a. Masih kurangnya sarana dan Prasarana yang dapat mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Satpol PP
- b. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dilingkungan Satpol PP yang memahami Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- c. Masih kurangnya Jumlah personel Satpol PP

Adapun faktor-faktor yang memepengaruhi hal tersebut adalah :

- a. Masih terbatasnya SDM yang bisa dimutasikan ke Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru atau belum adanya penerimaan calon PNS khusus Satuan Polisi Pamong Praja dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru
- b. Belum memiliki ruang khusus penyimpanan barang bukti
- c. Belum terbentuknya secretariat PPNS di Kota Banjarbaru

3.2. Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Visi dan Misi Kota Banjarbaru yang tercantum dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021 yaitu :

Visi : Terwujudnya Banjarbaru sebagai Kota Pelayanan yang Berkarakter.

Berkarakter terdiri atas dua aspek penting yaitu :

1. Sumber daya manusia yang berkarakter yaitu terciptanya sumber daya manusia yang sehat, mempunyai etos kerja tinggi dan berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai relegius.
2. Kota yang berkarakter, yaitu sebuah kota yang mempunyai cirri khas sebagai kota yang tertata / direncanakan (urban design) sehingga menjadi tempat hunian yang indah, aman dan nyaman berwawasan lingkungan.

Sedangkan Misi Kota Banjarbaru adalah :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan
3. Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan saran perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan.
4. Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan public dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi
- 5. Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib.**

Misi dalam RPJMD Kota Banjarbaru 2016 – 2021 tersebut mengacu dan berpedoman pada RPJPD Kota Banjarbaru Tahun 2005 – 2025 dan oleh karenanya terdapat hubungan yang kuat. Maka dari itu Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencapaian misi RPJMD Perubahan Kota Banjarbaru 2016 -2021 yaitu :

Tabel 3.1

Misi 5 :	Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib
Tujuan :	Meningkatnya Keamanan, kenyamanan dan ketertiban Masyarakat
Sasaran :	Meningkatkan keamanan, kesadaran hukum dan ketertiban masyarakat
Indikator Kinerja dalam RPJMD :	• Prosentase Kasus/Pelanggaran Perda, Perkada yang ditindaklanjuti • Jumlah petugas linmas yang terlatih dan Memiliki kompetensi • Jumlah Kerjasama dengan aparat Dalam Teknis Pencegahan Kejahatan • Prosentase Koordinasi dengan aparat
Program :	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan 5. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 6. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 7. Program Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Walikota 8. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 9. Program Pengamanan Pejabat dan Asset Daerah 10. Program Peningkatan kemampuan dan Penatalaksanaan Aparatur Satpol PP 11. Program Peningkatan Penanggulangan Kebakaran

3.3 Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019, bidang urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat masuk kedalam Program Bina Administrasi Kewilayahan Dengan sasaran program yaitu meningkatnya konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerjasama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan), dan batas antar Negara; serta meningkatnya standardisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta pencegahan dan penganggulangan bencana dan bahaya kebakaran. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu:

- a. Prosentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
- c. Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah;
- d. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat;
- e. **Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal);**
- f. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Program tersebut dijabarkan ke dalam 6 Kegiatan, yaitu:

- a. Penyelenggaraan Hubungan Pusat Dan Daerah Serta Kerjasama .Daerah Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan penyelenggaraan hubungan Pusat dan Daerah, melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan.

- b. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara .Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar yang dikembangkan.
- c. **Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat. Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.**
- d. Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran.
- e. Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah Dan Toponimi. Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi.Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan. Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Rencana strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yang terkait dengan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat tersebut diatas dapat disimpulkan dengan matrik sebagai berikut :

Tabel 3.2
Matrik Renstra
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Tahun Anggaran 2015-2019
Komponen : Ditjen Bina Administrasi
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR
1239	PEMBINAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat 1. Jumlah rumusan kebijakan bidang Polisi Pamong Prajadan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perlindungan Masyarakat, serta Hak Sipil dan HAM 2. Persentase fasilitasi pusat dan daerah Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Hak Sipil dan HAM 3. Jumlah daerah Kabupaten/Kota yang .membentuk Kelembagaan SatpolPP sesuai peraturan perundang-undangan 4. Jumlah daerah Kabupaten/kota yang mempunyai aparatur Satpol PP/PPNS dan Satlinmas yang sesuai standar 5. Jumlah daerah yang melaksanakansistem dan prosedur operasional penyelenggaraan bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindunganmasyarakat 6. Persentase daerah yang telah memfasilitasi 5P (penghormatan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan perlindungan) hak asasi manusia serta fasilitasi konferensi internasional bagi aparat Satpol PP 7. Inisiasi Gerakan Aparat Menuju Indonesia ramah (QW)

Tabel 3.3
Sasaran program dan kegiatan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam Negeri
Bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1239	PEMBINAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat					
		1. Jumlah rumusan kebijakan bidang Polisi Pamong Prajadan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perlindungan Masyarakat, serta Hak Sipil dan HAM	7 Rumusan	6 Rumusan	6 Rumusan	6 Rumusan	6 Rumusan
		2. Persentase fasilitasi pusat dan daerah Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Hak Sipil dan HAM	50 %	60 %	75 %	85 %	95 %
		3. Jumlah daerah Kabupaten/Kota yang membentuk Kelembagaan SatpolPP sesuai peraturan perundang-undangan	50 kab/kota	50 kab/kota	50 kab/kota	50 kab/kota	50 kab/kota

		4. Jumlah daerah Kabupaten/kota yang mempunyai aparat Satpol PP/PPNS dan Satlinmas yang sesuai standar	2.171 org	2.271 org	2.371 org	2.471 org	2.571 org
		5. Jumlah daerah yang melaksanakansistem dan prosedur operasional penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat	8 daerah	8 daerah	8 daerah	8 daerah	8 daerah
		6. Persentase daerah yang telah memfasilitasi 5P (penghormatan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan perlindungan) hak asasi manusia serta fasilitasi konferensi internasional bagi aparat Satpol PP	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
		7. Inisiasi Gerakan Aparat Menuju Indonesia ramah (QW)	1 Buku	-	-	-	-

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Permasalahan Pelayanan Satpol PP Kota Banjarbaru berdasarkan telaahan rencana tata ruang wilayah adalah rencana penataan PKL dikarenakan Kota Banjarbaru sebagai kota transit dan berkembang maka banyak pendatang dari luar kota yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima di wilayah Kota Banjarbaru. Sehingga perlu space-space penataan PKL agar tidak mengganggu keindahan, ketertiban dan kenyamanan warga Kota Banjarbaru.

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, bertujuan :

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan

Perda tersebut mengamanatkan pemberdayaan PKL dengan melakukan relokasi, pada tatanan pelaksanaan belum disebutkan secara tegas lokasi-lokasi yang akan dipergunakan sebagai tempat untuk relokasi PKL tersebut.

Rencana penentuan relokasi PKL merupakan perencanaan strategis yang nantinya akan berpengaruh terhadap penataan kota. Dengan kata lain penataan berupa relokasi PKL harus sejalan dengan konsep penertiban PKL Satpol PP yang mengacu kepada peruntukan kawasan-kawasan berdasarkan RTRW Kota Banjarbaru.

3.5 Penentuan Isu Isu Strategis

Isu – isu strategis tersebut menyangkut peluang dan tantangan, serta kekuatan dan kelemahan yang secara langsung maupun tidak langsung akan membatasi atau mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang dirumuskan berdasarkan Visi Pembangunan Kota Banjarbaru yang tertuang pada Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru sebagai perangkat daerah.

Isu isu domestik kota Banjarbaru untuk lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru antara lain sebagai berikut :

1. Penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL) tumbuh subur

Kota Banjarbaru merupakan tempat yang cukup menjanjikan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) adapun tempat-tempat PKL yang selama ini menjadi tempat favorit yaitu, Jl.MistarCokrokusumo, Jl.A.Yani Km 33, Jl. Panglima Batur, Km21 dan Lianganggang.

Pola penanganan selama ini yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu dengan melakukan patroli rutin dimana ada PKL ditempat tersebut langsung kita berikan pembinaan dan sanksi tegas, termasuk sanksi kita bawa kepengadilan untuk di sidangkan, namun untuk semua itu tidak juga membuat para PKL jera.

Perda yang mengatur PKL yang terbaru yaitu Nomor 6 Tahun 2014 sanksi Pidana 6 bulan kurungan dan denda Rp. 50.000.000,-, itupun belum membuat efek jera bagi PKL yang menempatkan dagangannya tidak sesuai peraturan.

Diharapkan melalui Renstra 2016 -2021 Pemerintah Kota Banjarbaru agar dapat memberikan solusi tentang PKL yang makin tumbuh subur dan dapat menyediakan tempat bagi PKL itu sendiri, sehingga keberadaannya dapat tertata dan terkelola dengan baik dan tidak terkesan kumuh

2. Tempat prostitusi pembatuan dan batu besi

Prostitusi di Kota Banjarbaru makin tahun makin bertambah yang sebelumnya di kisaran 100-164 orang PSK saat ini menjadi ± 238 orang PSK, dan kasus ini bukan tidak ditangani, pada tahun 2005 Satpol PP Kota Banjarbaru bekerja sama dengan Instansi terkaitseperti Kesbang Pol, Koramil dan Kepolisian melakukan upaya budaya malu masuk Pembatuan dengan membangun Pos Pantau pada saat itu, sehingga diharapkan dengan adanya Pos Pantau para pengunjung pembatuan dan batu besi menjadi sepi dan pos pantau ini hanya bias bertahan ± 3 bulan dikarenakan keterbatasan anggaran.

Satpol PP Kota Banjarbaru juga sering melakukan rajia Pekerja Sex Komersil (PSK) hingga disidangkan di Pengadilan, namun itu semua tidak membuat efek jera bagi PSK maupun *Germonya*, namun kenyataannya sampai saat ini makin bertambah penghuninya, belum

lagi penyakit HIV & AIDS yang di derita PSK apabila ini dibiarkan dan tidak segera dicarikan solusi untuk penutupan tempat tersebut tidak menutup kemungkinan penduduk non Banjarbaru lambat laun akan tertular juga dengan penyakit tersebut yang hingga kini belum ada obatnya.

Kedepan melalui Rencana Strategis Satpol PP Kota Banjarbaru diharapkan dapat menangani penyakit social seperti PSK dapat tertangani dengan baik sehingga tidak ada lagi PSK yang ada di Kota Banjarbaru.

3. Menjamurnya Karaoke Plus

Kota Banjarbaru merupakan tempat yang strategis untuk peluang usahatermasuk menjamurnya Karaoke yang terdapat di beberapa Kecamatan,hal ini merupakan sebuah tantangan bagi Satpol PP untuk menertibkan Karaoke yang tidak sesuai dengan peruntukannyase hinggabukanhanya Karaoke Keluarga saja namun sudah terindikasi Karaoke Plus, hal ini Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Satuan Polis Pamong Praja dan Instansi terkait untuk lebih meningkatkan pengawasannya terhadap Karaoke yang terindikasi plus-plus sehingga Kota Banjarbaru terbebas dari Prostitus itersebut.

Selama Satuan polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru sudah melakukan Pengawasan dan Sosialisasi yang berkenaan dengan keberadaan Karaoke, kedepannya melalui Renstra Satpol PP 2016 – 2021 Satpol PP dan Dinas terkait lebih meningkatkan Pengawasan dan Pemantauan terhadap Karaoke yang terindikasi plus-plus, sehingga Kota Banjarbaru dapat terbebas dari Prostitusi terselubung, apabila hal in tidak segera ditindak lanjuti maka dengan semakin menjamurnya Karaoke maka akan menjadi sulit dalam hal Pengawasan dan Pembinaannya.

4. Remaja dan Mirasantika

Masa remaja merupakan masa pembentukan karakter dan jati diri. Kota Banjarbaru dengan jumlah penduduk ± 220.168 jiwa (data BPS Tahun 2015) pergaulan remaja boleh dikatakan menghawatirkan,hal inii apabila tidak segera diatasi maka pergaulan remaja akan semakin jauh terjerumus dalam hal yang negatif.

Tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru telah mengamankan ABG (Anak Baru Gede) sejumlah $\pm$ 64 orang usiasekolahdari SMP/ SMK yang terlibat *mirasantika* mulai dari minuman Oplosan, Ngelem, dan Obat-obatan jenis Zenith. Berdasarkan data tersebut pergaulan remaja di Kota Banjarbaru sudah memprihatinkan sehingga hal ini memerlukan pengawasan yang cukup serius, sehingga remaja di Kota Banjarbaru dapat terbebas dari pergaulan yang menyesatkan walaupun dari data yang ada rata-rata remaja yang terlibat *mirasantika* bukan remaja asli dari Kota Banjarbaru, namun hal ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur agar remaja asli Kota Banjarbaru tidak terkontaminasi dengan hal yang dapat merusak masa depan remaja itu sendiri.

5. Maraknya Kost-kost an.

Kota Banjarbaru sebagai adalah merupakan Kota Pendidikan, dan ini tentu menjadikan kota Banjarbaru sebagai tempat pendidikan bagi masyarakat di Kalimantan Selatan khususnya. Hal ini menyebabkan bermunculannya tempat-tempat tinggal sementara (kost-kost-an) bagi para pelajar maupun mahasiswa/i yang datang dari berbagai daerah di Kalimantan selatan. Sebenarnya keadaan ini kalau dilihat secara proporsional awalnya biasa-biasa saja namun dalam perkembangannya ternyata setelah berjalan berdampak masalah social kemasyarakatan yang berpotensi terhadap pelanggaran Perda/Perkada yang ada di Kota Banjarbaru.

Sebagai contoh masalah IMB yang tidak jarang pemilik kost-kost-an mengabaikan aturan-aturan tentang Perijinan Membangun bangunan yang sejatinya sudah ada di Kota Banjarbaru. Selain itu muncul juga masalah social lainnya seperti pergaulan penghuni kost-kost-an itu sendiri yang sering kali pula sangat meresahkan masyarakat disekitarnya.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru yang berafiliasi dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kota Banjarbaru berupa Meningkatkan Budaya Tertib dengan Sasaran Meningkatnya penindakan pelanggaran perda adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 :

[illegible]

		Jumlah perda yang disosialisasikan	4 Perda	4 Perda	4 Perda	4 Perda	4 Perda
Misi 7 : Membangun Pos Jaga/Ronda							
		Rasio Pos Siskamling per jumlah RW (Jumlah pos/Jumlah RW)	39 pos	44 pos	49 pos	54 pos	59 pos
Misi 8 : Melakukan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Swakarsa							
		Ratio petugas keamanan lingkungan yang terlatih per jumlah RT	12 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran di atas tentunya dibutuhkan suatu strategi dan arah kebijakan yang harus ditetapkan dan dalam hal ini Satpol PP Kota Banjarbaru menerapkan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan membagi wilayah rawan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyakit masyarakat ke dalam lokasi bebas gangguan, lokasi dimaksud adalah :

a. lokasi PKL :

-  Jalan A. Yani Km 21
-  Jalan A. Yani Depan Bandara
-  Jalan Trikora (Palam)
-  Jalan Cokrokusumo
-  Jalan PM Noor
-  Lapangan Murjani dan sekitarnya
-  Minggu Raya dan sekitarnya
-  Jalan Pangeran Suriansyah
-  Jalan Pangeran Hidayatullah
-  Kawasan Kolam Renang dan Taman Gembira
-  Pasar Bauntung
-  Pasar Ulin Raya
-  Serta kawasan titik relokasi PKL

b.lokasi Penyakit Masyarakat, karaoke plus dan lokalisasi PSK

2. Peningkatan pembinaan, peneguran dan penindakan terhadap pelanggaran perda dengan rincian sebagai berikut :

-  Tahun 2017= 600 kasus
-  Tahun 2018= 195 tindakan
-  Tahun 2019= 210 tindakan
-  Tahun 2020= 230 tindakan
-  Tahun 2021= 250 tindakan

3. Peningkatan sosialisasi peraturan daerah dari tahun periode 2017-2021 rata-rata 4 perda dengan perhitungan jumlah perda yang disosialisasikan dibagi jumlah perda yang mengandung sanksi dikali 100
4. Pembangunan pos ronda pada setiap RT diseluruh Kota Banjarbaru

- 5. Melatih warga masyarakat untuk melakukan pengamanan lingkungan swakarsa pada pos-pos ronda
- 6. Rekrutmen warga masyarakat menjadi anggota Satlinmas.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Banjarbaru

VISI : TERWUJUDNYA BANJARBARU SEBAGAI KOTA PELAYANAN YANG BERKARAKTER			
Misi 5 : Memperkuat Cipta Kondisi Masyarakat Yang Aman, Nyaman Dan Tertib			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya Keamanan, Kesadaran Hukum, dan Ketertiban Masyarakat	✚ Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap perda/perkada	✚ Peningkatan kapasitas SDM perlindungan masyarakat (Linmas)
		✚ Meningkatkan ketentraman masyarakat	✚ Peningkatan sarana prasarana perlindungan masyarakat (Linmas)
		✚ Meningkatkan pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran	✚ Peningkatan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berikut ini Program- Program Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 – 2021 yaitu sebagai berikut :

Program Dan Kegiatan :

- 1. Program pelayanan administrasi perkantoran**
 - a. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - c. Penyediaan alat tulis kantor
 - d. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
 - e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
 - g. Penyediaan makan dan minum
 - h. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - i. Penyediaan jasa non PNS
- 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**
 - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - c. Pengadaan mebeleur
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /oprasional
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - h. Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor
- 3. Program peningkatan disiplin aparatur**
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan
 - b. Perencanaan dan pelaporan manajemen aset/barang
- 5. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**
 - a. Patroli Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - b. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
 - c. Koordinasi dan pelaksanaan pengamanan acara insidentil
- 6. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**
 - a. Pemberdayaan satlinmas untuk menjaga ketertiban dan keamanan

- 7. Program Penanggulangan Kebakaran**
 - a. Peningkatan Kesiagaan Penanggulangan Kebakaran
- 8. Program penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota**
 - a. Penegakan peraturan daerah, keputusan walikota dan penertiban perijinan
 - b. Pengawasan potensi pelanggaran perda dan perwali
 - c. Pembinaan dan penyuluhan/sosialisasi perda dan perwali
- 9. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**
 - a. Pembangunan pos jaga/ronda
 - b. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan swakarsa
 - c. Pengendalian keamanan lingkungan
- 10 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**
 - a. Pendidikan dan pelatihan non formal
 - b. Bimbingan teknis dan pelatihan peningkatan keterampilan dan pengetahuan personil
 - c. Peningkatan kesamaptaan aparatur Satpol PP
 - d. Peningkatan jiwa korsa aparatur Satpol PP
 - e. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

Rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru Periode Tahun 2016-2021 disajikan dalam table berikut :

Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

*Renstra
Satuan polisi pamong praja
Kota Banjarbaru tahun 2016 - 2021*

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
									Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5							
									TARGET	Rp. (juta)	TARGET	Rp. (juta)	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET	Rp.
1	2	3	4				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Meningkatnya Keamanan, kenyamanan dan ketertiban Masyarakat	Meningkatnya keamanan, kesadaran hukum dan ketertiban masyarakat	Peningkatan sarana prasarana dan kapasitas aparatur penegakan perda	1	05	1	05	01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan pelayanan Internal	100%	100%	1.276.700	100%	1.670.707	100%	1.669.543	100%	1.783.020	100%	1.710.598	100%	1.734.679.582		
			1	05	1	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya surat menyurat	1100 Materai	1100 Materai	3,000	1100 Materai	3,076	1100 Materai	3,300	1100 Materai	3,000	1100 Materai	3,800	1100 Materai	3,800		
			1	05	1	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	12 bulan	11.400	12 bulan	89.400	12 bulan	78.648	12 Bulan	86.512	12 bulan	77.000	12 bulan	80.850		
			1	05	1	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Orang	1 Orang	6,000	1 Orang	14.400	2 Orang	14.400	2 Orang	14.400	2 Orang	14.400	2 Orang	15.120		
			1	05	1	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	50 jenis ATK	50 jenis ATK	12.450	30 jenis ATK	22.924	30 jenis ATK	22.657	30 jenis ATK	24.923	30 jenis ATK	24.923	30 jenis ATK	26.169		
			1	05	1	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jenis	9 jenis	15.000	8 jenis	10.000	11 jenis	8.740	11 jenis	9.619	11 jenis	9.300	11 jenis	9.765		
			1	05	1	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih	2 jenis	9 jenis	5.000	11 jenis	4.996	19 jenis	7.966	19 jenis	7.440	19 jenis	6.000	19 jenis	6.300		
			1	05	1	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan	jenis	3 jenis	3.000	3 jenis	3.000	3 jenis	3.000	3 jenis	3.300	3 jenis	3.300	3 jenis	3.465		

					undangan	undangan															
1	05	1	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu	Bulan	11 bulan	60.345	11 bulan	83.523	11 bulan	80.352	11 bulan	132.630	11 bulan	118.715	11 bulan	124.650		
1	05	1	01	18	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Teralaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Oh	167 oh	115.305	120 oh	204184	12 bulan	218.500	12 bulan	239.508	12 Bulan	221.980	12 Bulan	233.079		
1	05	1	01	19	Penyediaan Jasa Non PNS	Tersedianya jasa Non PNS	67 orang	67 orang	1.045.200	81 orang	1.235.280	81 orang	1.235.280	81 orang	1.264.692	91 orang	1.235.200	91 orang	1.235.200		
1	05	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	390.954	Baik	796.803	Baik	600.427	Baik	600.427	Baik	600.427	Baik	630.448		
1	05	01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	5 Jenis	8 Jenis	55.000	3 Jenis	163.900	10 Jenis	61.450	8 Jenis	61.450	8 Jenis	61.450	8 Jenis	64.522		
1	05	01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik	Jenis	12 Jenis	50.000	5 Jenis	94.500	6 Jenis	74.200	12 Jenis	74.200	12 Jenis	74.200	12 Jenis	77.910		
1	05	01	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Mebeleur dalam kondisi baik	Jenis	5 Jenis	49.500	2 Jenis	20.500	2 Jenis	14.650	5 Jenis	14.600	5 Jenis	14.650	5 Jenis	15.382		
1	05	01	02	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan dalam kondisi baik	Unit	1 unit	54.924	1 unit	34.985	1 unit	30.208	1 unit	30.208	1 unit	30.208	1 unit	31.718		
1	05	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas /Operasional dalam kondisi baik	19 Unit	5 mobil	166.830	7 buah	234720	21 Unit	179.069	19 unit	189.609	19 Unit	179.069	19 Unit	188.022		
1	05	01	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan gedung Kantor dalam kondisi baik	12 kali	12 kali	5.700	12 kali	15.300	12 kali	10.350	12 kali	10.300	12 kali	10.350	12 kali	10.867		
1	05	01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala	Terpeliharanya Peralatan gedung	3 Jenis	6 Jenis	7.500	8 Jenis	31.400	6 Jenis	12.000	6 Jenis	12.000	6 Jenis	12.000	6 Jenis	12.600		

							a peralatan gedung kantor	Kantor dalam kondisi baik															
			1	05	01	02	-	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya Mebeleur dalam kondisi baik	3 Jenis	3 Jenis	1.500	3 Jenis	1.498	Jenis	-	Jenis	-	Jenis	-	Jenis	-	
			1	05	01	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dalam kondisi baik	-	-	-	100%	200.000	100%	218.500	100%	207.960	100%	218.500	100%	229.425	
			1	05	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin pegawai	100%	100%	141.920	100%	141.870	100%	79.593	100%	147.870,	100%	141.870	100%	148.963	
			1	05	01	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas Pegawai	139 stel	1 paket	141.920	140 stel	141.870	100%	79.593	144 stel	147.870	144 stel	147.870	144 stel	155.263	
			1	05	01	06	-	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	-	B	68.912	B	38.868	B	31.348	BB	46.916	BB	53.483	A	58.831	
			1	05	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu	-	-	-	5 dok	9.865	5 dok	8.622	5 dok	23.572	5 dok	29.000	5 dok	31.900	
			1	05	01	06	09	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	- Kesesuaian BMD Satpol PP dengan Neraca Asset - Jumlah Laporan Inventaris barang tepat waktu	Dok	9 Dok	22.652	9 Dok	16.138	9 Dok	14.104	9 Dok	13.772	9 Dok	14.482	9 Dok	15.930	
			1	05	01	06	05	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	-Jumlah pelaporan keuangan tepat waktu Waktu penyelesaian SPM dinyatakan lengkap dan tepat waktu	6 Dok	6 Dok	46.260	2 Dok	9.865	2 dok	8.622	2 dok	9.572	2 dok	10.000	2 dok	11.000	

1	05	01	16		Program Pemeliharaan Kantranti bmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal	Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat							100%	951.090	100%	1.157.072	100%	1.266.339			
						Persentase Permintaan Pengamanan Acara Insedentil & Acara Berskala Massal yang dilaksanakan	-	100%	634.038-	6 kawasan-	405.644-	100%	1.113.909-	-	-	-	-	-			
1	05	01	16	14	Patroli Pengawasan & Pemeliharaan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah lokasi PKL dan reklame yang sesuai aturan Jumlah kegiatan penjagaan dan pengamanan asset daerah yang dilaksanakan	Kegiatan	936 kali	564.961	180 Kegiatan	376.181	9 lokasi	753.305	12 lokasi	834.000	15 lokasi	1.028.272	18 lokasi	1.131.099		
1	05	01	16	02	Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan dalam teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah pembentukan Tim Terpadu penyelenggaraan Tibum Tranmas	-	120 Laporan	37.996	1 Tim	167.428	1 Tim	360.603	1 Tim	117.090	1 Tim	128.799	1 Tim	135.239		
1					Koordinasi dan Pelaksanaan Pengamanan Acara Insidentil Masyarakat & Acara Berskala Massal	Cakupan pelaksanaan kegiatan pengamanan kegiatan insedentil yang terkoordinir dan terarah	-	12 bulan	31.079	12 bulan	29.142	100%	-	100%	-	-	-	-			
1	05	01	19		Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Cakupan pelaksanaan petugas Linmas yang dibina		100%	107.285	5 orang	63.241	100%	59.788	100%	215.788	100%	300.788	100%	315.828		

					n																
1	05	01	19	05	Pemberdayaan Satlinmas untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Jumlah peserta pelatihan dan jumlah peserta yang dilantik, Jumlah patroli ketertiban dan keamanan masyarakat	5 Orang	100%	107.285	5 orang	63.241	40 orang	59.788	40/20 orang	215.788	40/20 orang	300.788	40/20 Orang	330.867		
1	05	01	24		Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Persentase kasus/ pelanggaran perda yang ditindak lanjuti	-	-	396.824	60%	300.366	100%	308.700	100%	386.117	100%	441.612	100%	463.693		
						Pesentase perda yang disosialisasikan															
1	05	01	24	01	Penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Walikota, dan Penertiban Perijinan	Jumlah penindakan terhadap Pelanggaran Perda/perkada	kasus	400 kasus	190.375	600 kasus	153.264	195 tindakan	174.146	210 tindakan	230.353	230 tindakan	253.389	250 tindakan	266.058		
1	05	01	24	04	Pengawasan Potensi Pelanggaran Perda dan Perwali	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan		180 Kegiatan	167.000	450 kasus	103.460	144 Kegiatan	95.353	160 kegiatan	114.603	174 Kegiatan	145.005	188 Kegiatan	152.255		
1					Pembinaan dan Penyuluhan /Sosialisasi Perda dan Perwali	Jumlah perda yang disosialisasikan	-	40 orang	39.449.	4 perda	43.642	4 perda/ 144 giat	39.200	4 perda/ 160 giat	41.160	4 perda/ 174 giat	43.218	4 perda/ 188 giat	45.378		
1	05	01	29		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Jumlah Pos Kamling	-	-	145.682	100%	119.251	40%	75.386	48%	82.925	56%	90.465	64%	99.511		

						Meningkatnya Petugas Keamanan Lingkungan	-	12%	-	26%	-	41%	-	58%	-	79%	-	100%	-		
1	05	01	29	01	Pembangunan pos jaga /ronda	Jumlah Pos Jaga/Ronda Yang terbangun	-	3 buah	106,682	3 buah	89.670	2 pos	48.070	2 pos	52.877	2 Pos	57.108.	2 Pos	62.818		
1	05	01	29	02	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Swakarsa	Jumlah Petugas jaga malam yang mengikuti pelatihan pengendalian swakarsa	0 Keg	3 kegiatan	16.000	2 kegiatan	7.661	30 orang	27.316	30 orang	30.048	30 orang	33.357	30 Orang	36.692		
1					Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan		12 bulan	23.000	360 kegiatan	21.920	360 Kegiatan	21.920	360 Kegiatan	21.920	360 Kegiatan	21.920	360 Kegiatan	21.920		
1					Program Pengamanan Pejabat dan Aset Daerah	Cakupan penjagaan dan pengamanan pejabat dan aset daerah			978.199	100%	850.608	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Persentase Kegiatan Walikota & Wakil Yang Kawal															
1					Pengamanan Rutin Rumah Dinas dan Aset	Jumlah Piket Penjagaan Aset dan Rumah Dinas		12 Bulan	913.159	360 Kegiatan	791.478	-	-	-	-	-	-	-	-		
1					Pengamanan Pejabat dan aset daerah	Jumlah Pengamanan dan Pengawasan Kegiatan Walikota & Wakil diluar kantor		12 Bulan	64.999	150 Kegiatan	59.130	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	05	01	05		Program Peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur	Cakupan petugas Satpol PP yang diawasi		66%	534.689	74%	404.233	80%	600.427	80%	391.476	72 %	435.792	64 %	457.582		

									Cakupan pelatihan dan peningkatan kualitas SDA																
			1	05	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah personil Satpol PP yang mengikuti Pelatihan Dasar, Bimtek dan Diklat		2 Kegiatan	200.000	20 Orang	184.560	10 Orang	68.568	10 Orang	69.997	9 Orang	75.596	7 Orang	79.375			
			1	05	01	05	11	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Peningkatan Ketrampilan dan Pengetahuan Personil	Jumlah Personil yang mengikuti Bimtek dan Pelatihan Keterampilan dan Pengetahuan		27 Kegiatan	109.700	40 Orang	68.824	52 Orang	137.005	52 Orang	141.855	52 Orang	151.048	52 Orang	158.600			
			1	05	01	05		Diklat dan Bimtek Peningkatan Kemampuan PPNS	Terlaksananya diklat dan bimtek peningkatan kemampuan PPNS		1 kali	39.990	2orang	9.000	-	-	-	-	-	-	-				
			1	05	01	05	13	Peningkatan Kesamaptan Aparatur Satpol PP	Jumlah Personil yang mengikuti kegiatan kesamaptaan		1 kali	80.000	40 orang	60.016	44 orang	50.818	44 orang	48.818	44 orang	53.358	44 orang	56.026			
			1	05	01	05	14	Peningkatan jiwa korsa Aparatur Satpol PP	Jumlah Personil yang mengikuti kegiatan Jiwa Korsa		1 kegiatan	29.999	40 orang	6.096	44 orang	35.516	44 orang	35.516	44 orang	39.156	44 orang	41.114			
			1					Pegawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Cakupan pengawasan pengendalian Satpol PP		121 kali kegiatan	74.999	272 kegiatan	76.164	156 kali kegiatan	71.252	192 kali kegiatan	95.514	100%	116.633	100%	122.465			
			1	05	01	23		Program Penanggulangan Kebakaran	Cakupan kesiagagaan, penanggulangan Kebakaran & time respon		-	-	100%	685.386	100%	621.158	100%	807.433	100%	869.622	100%	993.854			

			1	05	01	23	01	Peningkata n Kesiagaan Penanggula ngan Kebakaran	Cakupan pelayanan siaga kebakaran tanggap respon bencana	-	-	-	100%	685.386	100%	621.158	100%	807.433	100%	869.622	100%	993.854		
--	--	--	---	----	----	----	----	---	--	---	---	---	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------	--	--

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Banjarbaru

Ttd.

H. MARHAIN RAHMAN, S.Sos. M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19680716 199010 1 001

Dari tabel tersebut di atas, pencapaian program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru diukur menggunakan parameter dengan uraian sebagai berikut :

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.1 Pembangunan Pos Jaga/ ronda

<u>Jumlah pembangunan Pos Kamling</u> 700 (jumlah RT) X 100
--

Perhitungan jumlah pos kamling yang sudah dibangun ditambahkan dengan jumlah pos yang akan dibangun (berkesinambungan)

1.2 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan swakarsa

<u>Jumlah petugas swakarsa yang dilatih</u> 700 (jumlah RT) X 100
--

1.3 Pengendalian keamanan lingkungan

Jumlah Kegiatan Pengendalian Yang Dilaksanakan
--

2. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

<u>Jumlah lokasi Yang Disterilkan</u> Jumlah lokasi Yang Belum Steril (18 kawasan) X 100
--

Jumlah kawasan yang sudah steril ditambahkan dengan kawasan yang akan disterilkan (berkesinambungan)

<u>Jumlah Respon Pengamanan</u> Jumlah Permintaan Pengamanan X 100
--

2.1 Patroli Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Jumlah Pelaksanaan Patroli Pensterilan Kawasan
--

2.2 Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Jumlah Pembentukan Tim Terpadu

2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Pengamanan Acara Insidentil

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Acara Insidentil Permintaan Masyarakat
--

3. Program Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Walikota

<u>Jumlah penyelesaian penegakan Perda</u> Jumlah Pelanggaran Perda X 100
--

<u>Jumlah Perda Yang Disosialisasikan</u> Jumlah Perda Yang Mengandung Saksi (60 perda) X 100
--

3.1 Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

Jumlah Kasus Pelanggaran Perda Yang Ditegur & Ditindak
--

3.2 Pengawasan Potensi Pelanggaran Perda dan Perwali

Jumlah Pengawasan Kasus Pelanggaran Perda Pasca Peneguran dan Penindakan

3.3. Pembinaan dan Penyuluhan/sosialisasi Perda dan Perwali

Jumlah Perda Yang Disosialisasikan

4. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

<u>Jumlah Tugas Linmas Yang Dilaksanakan</u> Jumlah Tugas Linmas (permendagri 84/2014) X 100

4.1 Pemberdayaan Satlinmas untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan

Jumlah Anggota Linmas Yang Dilantik

5. Program Pengamanan Pejabat dan Asset Daerah

<u>Jumlah Rumah Dinas dan Asset Yang Diamankan</u> Jumlah Rumah Dinas & Aset Yang Ada X 100
--

<u>Jumlah Kegiatan Pengamanan Pejabat</u> Jumlah Kegiatan Pejabat (jadwal protokol) X 100
--

5.1 Pengamanan Rutin Rumah Dinas dan Asset

Jumlah Kegiatan Pengamanan Rutin Rumah Dinas dan Asset
--

5.2 Pengamanan Pejabat

Jumlah Kegiatan Pengamanan Pejabat

6. Program Peningkatan Kemampuan dan Penatalaksanaan Aparatur Satpol PP

<u>Jumlah Pengawasan Piket</u> Jumlah Piket (420)	X 100
--	-------

<u>Jumlah Personel Yang Dilatih</u> Jumlah Personel	X 100
--	-------

6.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah Personel Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
--

6.2 Bimbingan Teknis dan Pelatihan Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Personel

Jumlah Personel Yang Mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Personel Formal
--

6.3 Diklat & Bimtek Peningkatan Kemampuan PPNS

Jumlah Personel Yang Mengikuti Diklat & Bimtek Peningkatan Kemampuan PPNS

6.4 Peningkatan Kesamaptaan Aparatur Satpol PP

Jumlah Personel Yang Mengikuti Kesamaptaan Aparatur Satpol PP

6.5 Peningkatan Jiwa Korsa Aparatur Satpol PP

Jumlah Personel Yang Mengikuti Peningkatan Jiwa Korsa

6.6 Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

7. Program Penanggulangan Kebakaran

<u>Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran</u> X 100% Luas Wilayah Kota Banjarbaru
--

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru yang mengacu Pada tujuan dan sasaran RPJMD, Indikator Kinerja ditampilkan dalam tabel berikut :

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada	50.00	55	60	70	80	90	100
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada	50.00	55.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00
	Jumlah Kasus Konflik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Meningkatnya Jumlah Petugas Linmas Yang Dibina	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Persentase Kasus/Pelanggaran Perda Perkada Yang Ditidak Lanjuti	100.00	100.00	100.00	100.00	48.00	100.00	100.00
	Meningkatnya Jumlah Pos Kamling	34.00	34.00	39.00	40.00	48.00	56.00	64.00
	Meningkatnya Petugas Keamanan Lingkungan	12.00	12.00	26.00	41.00	58.00	79.00	100.00

BAB VIII P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru tahun 2016 – 2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Perubahan Tahun 2016-2021 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang sangat mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru 2016 – 2021 ini merupakan pedoman dalam penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan yang sekaligus sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Penyusunan Renstra ini juga diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan kebutuhan baik secara internal Satpol PP maupun dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.

Akhirnya dengan selesainya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam upaya mewujudkan Salah satu Misi Kota Banjarbaru yakni ***memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib.***

Banjarbaru, Juni 2018
**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Banjarbaru**

H. MARHAIN RAHMAN, S.Sos, M.AP
**Pembina Tingkat I
NIP. 19680716 199010 1 001**